



JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES	2016	HAL: 10
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	------	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

■ DIPA Kalbar Capai Rp 8,8 T

PONTIANAK, TRIBUN - Gubernur Kalbar Cornelis mendorong instansi vertikal, satuan kerja (Satker) provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Kalbar mempercepat proses lelang proyek infrastruktur usai penyerahan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017. DIPA 2017 diserahkan Gubernur di Balai Petiti Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (13/12).

Cornelis menyerahkan 547 DIPA tahun 2017 senilai Rp 8.8 triliun.

"Perlu dilakukan percepatan proyek, terutama infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa berskala besar melalui proses pengadaan barang dan jasa sebelum anggaran dimulai," ujar Cornelis.

Cornelis menuturkan, penyerahan DIPA ini lebih cepat dengan harapan pembangunan bisa dilakukan dengan secepatnya. Proses lelang, jelasnya, bisa dilakukan pada triwulan keempat tahun 2016 ini. Tujuannya, agar pembangunan bisa dilakukan pada awal 2017.

Perlu dilakukan percepatan proyek, terutama infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa berskala besar melalui proses pengadaan barang dan jasa sebelum anggaran dimulai

Cornelis
Gubernur Kalbar

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalbar Supendi menuturkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.

"Perlu dilakukan percepatan proyek, terutama infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa berskala besar melalui proses pengadaan barang dan jasa sebelum anggaran dimulai," ujarnya.

Ia menambahkan, demi kelancaran lelang, penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun anggaran yang lalu masih berlaku sepanjang belum dilakukan pergantian pejabat perbendaharaan.

Ia meminta KPA agar meliti kembali DIPA petikan yang telah diterima. Jika ter-

dapat kesalahan administratif, jelasnya, maka sesegera mungkin mengajukan revisi ke Kanwil DJPB Kalbar.

Jika masih terdapat anggaran yang diblokir dalam catatan halaman IV DIPA, lanjutnya, maka harus dilengkapi data pendukung untuk disampaikan ke Unit Eselon I.

"Terkait pengadaan barang dan jasa, lakukan pendataan pekerjaan belanja modal dan segera realisasikan sesuai ketentuan, terutama pekerjaan dengan nilai paket sampai dengan Rp

da



JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES	2016	HAL: 10
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	------	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

200 juta," jelasnya.

Jika dibandingkan dengan APBN 2016 lalu, maka terdapat penurunan pagu sebesar Rp 117,3 miliar atau 2 persen.

Sementara DIPA Satker instansi vertikal meningkat Rp 246,2 miliar, atau 7,6 persen. DIPA kewenangan kantor daerah juga bertambah sebesar Rp 118 miliar atau 2,7 persen.

Dana dekonsentrasi turun Rp 149,5 miliar atau 44,3 persen, tugas pembantuan berkurang sebesar Rp 391 miliar atau 40,2 persen dan

dana urusan bersama juga mengalami penurunan Rp 1 miliar atau 1,7 persen.

Selain itu, alokasi belanja barang juga mengalami penurunan sebesar Rp 358 miliar atau 10,6 persen dan belanja modal juga berkurang sebesar Rp 45,8 miliar atau 1,7 persen.

Demikian pada belanja bantuan sosial menurun sebesar Rp 1 miliar atau 4,4 persen. Untuk biaya belanja pegawai meningkat Rp 126,7 miliar atau 4,2 persen.

Adapun alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2017 ditetapkan Rp 19,6 triliun, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 12,1 triliun, Dana Bagi Hasil Rp 816,4 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 5 triliun, Dana Insentif Daerah Rp 60 miliar dan Dana Desa Rp 1,6 triliun.

"Dengan diserahkannya DIPA tahun 2017 ini, diharapkan agar Satker dan Pemda segera melaksanakan APBN/APBD secara tepat dan akuntabel untuk pembangunan daerah Kalbar," tegasnya. **(oni)**